

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi pemerintah adalah jenis organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Layanan-layanan ini dapat mencakup peningkatan keamanan, peningkatan standar pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, tujuan utama organisasi nirlaba ini bukanlah mencari keuntungan. Dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik unik yang memberikan kesan bahwa mereka adalah organisasi politik daripada ekonomi. Namun, seperti bentuk kelembagaan lainnya, lembaga dan organisasi nasional juga memiliki aspek kelembagaan ekonomi. Lembaga-lembaga negara di satu sisi mempunyai berbagai biaya untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya, namun di sisi lain harus melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi semua biaya tersebut.

Jasa akuntansi diperlukan bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk mengawasi dan menghasilkan data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi saat mereka menjalankan bisnis. Namun sifat akuntansi pemerintahan berbeda dengan sifat akuntansi korporasi karena perbedaan sifat lembaga pemerintah dan bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan, maka pemerintah

memerlukan suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu sejalan dengan bagaimana akuntansi pemerintahan dilaksanakan di Indonesia.

Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah akan mampu memberikan keseimbangan fiskal bagi pemerintah. Pemerintah diberikan kekuasaan atau otonomi secara penuh, efektif dan bertanggung jawab secara proporsional. Hal ini dilakukan melalui pengaturan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta keseimbangan demokratis antara keuangan daerah dan pusat, partisipasi masyarakat, pemerataan keadilan, serta pertimbangan potensi dan keberagaman lokal, khususnya oleh pemerintah kabupaten dan kota. dicapai pemerintah. Tujuan penyediaan sumber daya keuangan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan, dan keadilan sosial.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5). Dalam hal ini, berhasil atau tidaknya kemandirian yang selalu diupayakan oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada fungsi pemerintah daerah. Selain kontroversi mengenai belum adanya kesiapan daerah di sejumlah daerah untuk

melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah dinilai paling efektif dalam mendorong pembangunan daerah. mengubah sistem pembangunan terpusat yang dianggap sebagian pihak menjadi penyebab lambannya pembangunan daerah dan meningkatnya kesenjangan antar daerah.

Ada empat komponen utama yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Keempat komponen tersebut adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi, menurut Cheema dan Rondinelli (Anita, 2018). Tanggung jawab untuk mengelola keempat komponen tersebut dengan baik dan efisien berada pada daerah. sehingga suatu daerah mampu bekerja secara mandiri dan efektif. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen yang didelegasikan oleh pemerintah federal kepada pemerintah daerah. Unsur utama desentralisasi dalam pembentukan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang mengantarkan era baru bagi pembangunan daerah dan masyarakatnya dalam hal sumber daya dan segala pengelolaan.

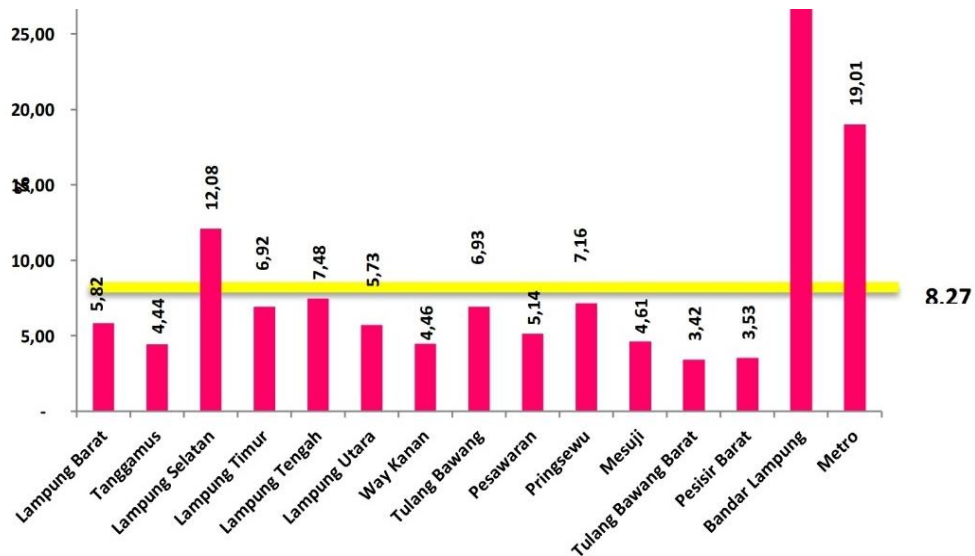
Ketika otonomi daerah terwujud, maka kewenangan pemerintah daerah akan meningkat, begitu pula tanggung jawabnya. Pengaruh luasnya kekuasaan politik yang diberikan kepada daerah dalam otonomi daerah dapat memberikan keuntungan bagi daerah. Namun di sisi lain, seiring dengan bertambahnya jumlah urusan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, peningkatan kapasitas daerah menjadi beban yang

memerlukan motivasi daerah. Oleh karena itu, berbagai aspek perlu dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana setempat. Aspek keuangan menjadi salah satu kriteria mendasar untuk menilai benar-benar mampu tidaknya suatu daerah mengelola anggarannya sendiri. Kapasitas daerah adalah sejauh mana suatu daerah mampu menggunakan sumber daya keuangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keuangannya tanpa bergantung pada dukungan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam anggaran peruntukan daerah (APBD) menyediakan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencapai agenda pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi daerah. Ini mewakili kapasitas pemerintah daerah. Menurut Yuliati (2019), salah satu ciri utama daerah yang mampu mencapai otonomi daerah adalah semakin rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan kemampuan keuangannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan pada saat itulah PAD diharapkan bertanggung jawab atas sebagian besar mobilisasi sumber daya pelaksanaan pemerintah lokal. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip pemerintahan mandiri yang benar, inklusif, dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan awal daerah dalam keuangan daerah menjadi tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini

disebabkan semakin besar suatu daerah menerima dan menghimpun PAD-nya, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Gambar 1.1
Rasio PAD Terhadap Pendapatan



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap pendapatan daerah kabupaten Lampung Timur tahun 2021 tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu sebesar 6,92. Dimana pemerintah kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal menggunakan APBD nya. Realitas dan kondisi infrastruktur yang tidak memadai kerap menjadi masalah besar bagi masyarakat umum, karena hal tersebut berdampak pada lambatnya perputaran ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan statistik darat pada tahun 2021 melaporkan bahwa provinsi Lampung masuk ke daftar 10 provinsi dengan jalan rusak berat terpanjang di Indonesia.

Pada pertengahan tahun 2023 infrastruktur provinsi Lampung sempat viral di berbagai media sosial, dampak dari komentar dan kritik dari seorang pemuda Aryo Bima yang mengkritisi kondisi jalan rusak di berbagai daerah di provinsi Lampung berbuntut kasus yang panjang (<https://trends.tribunnews.com/2023/04/16/setelah-kritikan-bima-viral-kondisi-jalan-di-lampung-kini-tuai-sorot-rusak-parah-penuh-lumpur>)

Gambar 1.2
Berita Viral Lampung 1

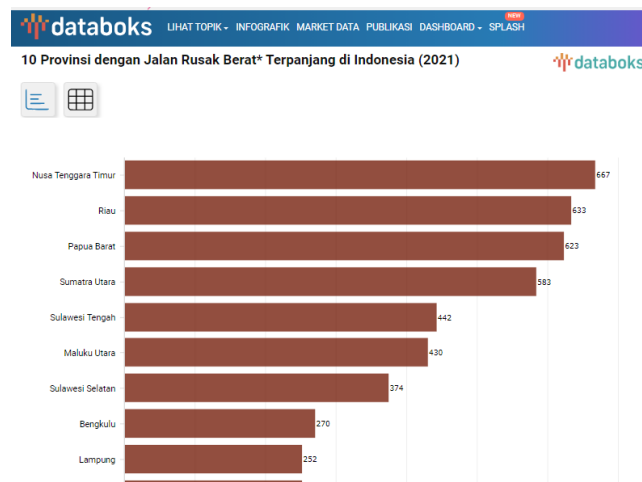


Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum>

Kritik yang dilakukan oleh pemuda asal Lampung Timur tersebut menuai Perhatian pengguna sosial media dan masyarakat luas yang menjadikan peristiwa tersebut viral hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Kritik yang disampaikan bukan tanpa sebab, karena keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur yang ada di provinsi Lampung tepatnya kabupaten Lampung Timur pada khususnya. Dimana masih terdapat jalan

yang jelek dan rusak parah. Kritik Bima itu sejalan dengan data dalam laporan Statistik Transportasi Darat 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut laporan tersebut, pada 2021 Lampung masuk ke daftar 10 provinsi dengan **jalan rusak berat** terpanjang di Indonesia. BPS mendefinisikan "jalan rusak berat" sebagai jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 0-20 km per jam. Di Lampung, jalanan provinsi yang rusak sesuai kategori ini panjangnya mencapai 252 km.

Gambar 1.3
10 Provinsi Dengan Jalan Rusak Parah



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/17/lampung-masuk-daftar-10-provinsi-dengan-jalan-rusak-berat-terpanjang>

Dampak dari rusak parahnya jalan yang ada di provinsi Lampung mengindikasikan kurang maksimalnya penggunaan APBD dan APBN. Kondisi yang berjalan selama bertahun-tahun tidak juga menuai hasil yang baik. Kondisi semakin parah dan hal tersebut dapat menghambat roda

perekonomian masyarakat. Apalagi kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu jalur ekonomi potensial dan jalur lintas antar provinsi.

Gambar 1.4
Berita Bantuan Pemerintah Pusat



Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-6705899/jokowi-akan-kucurkan-rp-800-m-untuk-perbaiki-15-ruas-jalan-rusak-di-lampung>

Hal ini membuat pemerintah pusat turun kelapangan, dalam hal ini presiden Joko Widodo mendatangi dan melihat langsung kondisi jalan yang ada di daerah-daerah di provinsi Lampung pada tanggal 5 Mei 2023. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan adanya saluran bantuan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk menyelesaikan permasalahan jalanan yang rusak parah. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Penggunaan APBD yang maksimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Anita Wulandari (2017) melakukan penelitian mengenai kapasitas keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kota Jambi menghadapi kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang juga disebabkan oleh rendahnya kontribusi awal pendapatan asli daerah. Widodo (2018) melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi pemerintah daerah Bojolali dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan fungsi negara, pembangunan dan pelayanan sosial masih relatif rendah dan cenderung menurun. Perbedaan diantara kedua penelitian diatas adalah adanya perbedaan kemampuan keuangan daerah, dimana penelitian yang dilakukan oleh Anita Wulandari menunjukkan rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di kota Jambi karena rendahnya pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian Widodo menunjukkan pembangunan dan pelayanan sosial kabupaten Boyolali masih rendah dan cenderung menurun

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan

uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **"ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR "**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Apakah terdapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?"

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada perkembangan APBD di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020-2022.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Dapat memberikan tambahan informasi yang berguna terhadap dunia ilmu pendidikan khususnya pengetahuan di bidang keuangan pemerintahan daerah, selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menerapkan ilmu yang didapat semasa dibangku kuliah dan menerapkan kedalam praktek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk bersama-sama menjadi pengawas jalannya pemerintahan